Sekoci-sekoci dari Perahu yang Besar

KH. HASYIM MUZADI,
Ketua Tanfidliyah NU Wilayah Jawa Timur dan
Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang.

Anda pernah melontarkan gagasan bahwa nilai-nilai NU perlu dipagari dan di jaga oleh struktur. Bisa dielaborasi lebih jauh?

Kalau kultur NU tidak mendapatkan santunan dari struktur kekuasaan dia tidak bisa berkembang dan cenderung layu. Kultur apapun sebenarnya memerlukan dukungan struktur. Misalnya, NU suka baca qunut, tahlilan, dlibaan dan NU punya nilai-nilai seperti *'adalah, musawah, tawazun, tasamuh, i'tidal* dan sebagainya lalu kultur itu tidak mendapatkan dukungan struktur, kan begini jadinya. Inipun jika negara membiarkan kultur NU, maka NU akan bisa berkembang sendiri. Tetapi bagaimana kalau terjadi hubungan antagonisme. Maka untuk menjamin itu, NU sendiri harus mempunyai kekuatan struktural di luar kulturnya. Tetapi NU tidak boleh menjadi organisasi politik. Karena begitu menjadi organisasi politik, NU akan menjadi sektoral. Tidak bisa multi sektoral. Tetapi dia memerlukan perlindungan politik itu. Untuk bisa mengatur begitu, maka NU tidak boleh menjadi partai politik tetapi NU perlu punya partai politik yang terpercaya untuk melindungi kultur itu di gerakan struktur. Ini sama-sama menuju satu titik dari dua jalan yang berbeda. Gerakan politik mesti power, gerakan jam'iyyah kan tidak. Oleh karenanya NU dengan PKB, —kalau PKB yang dipilih— secara struktural harus pisah tetapi secara visioner dan misioner ia harus tunduk kepada nilai yang ada di NU. Nah bagaimana pengejawantahan nilai menjadi sebuah gerakan, itu diproses di dalam organisasi politik itu. Dengan demikian maka ada pemilahan tugas sekalipun bukan pemisahan. Ini yang saya maksud kita tidak perlu menjadi organisasi politik tetapi kita perlu punya organisasi politik.

Bagaimana hubungan NU dengan parpol lain di luar yang dipilihnya?

Karena NU itu aset nasional ia tidak boleh menutup diri juga dengan organisasi-organisasi politik lain di luar yang dipilihnya. Orpol-orpol itu sebagai sekoci-sekoci kecil dari perahu yang besar. Ini dimaksudkan supaya ladang-ladang itu semua terisi tetapi tidak menimbulkan bentrok ketika dia berebut massa. Ini pelik kan? Satu segi kita igin mengabdi kepada semuanya, di lain segi kita menghindarkan massa NU dari belahan-belahan politik itu.

Hal-hal apakah dari kultur NU yang sangat

perlu segera disupport oleh struktur?

Untuk melihat apa yang harus disupport oleh struktur dari kultur NU itu, saya mencatat beberapa hal yang menjadi potensi sekaligus jadi problematika di dalam NU; Pertama, tentang pengertian, pengalaman dan wawasan keagamaan. Ini adalah satu kelompok masalah yang harus dihadapi dengan *dirasah, tarbiyah, tazkiyah* dan *bahtsul masail* serta fatwa. Saya ambil contoh mengenai *dirasah* kita di Lembaga Pendidikan Ma'arif itu masih sangat minim. Pendidikan kita pun masih dimonopoli oleh pesantren. Dan yang menjadi kendala besar adalah lulusan-lulusan dari pesantren salafiyah kita itu sudah memenuhi syarat dalam *madah diniyyah*, tapi belum cukup mumpuni dalam *thariqah*, atau metodologi yang dapat mengembangkan ilmunya. Sehingga banyak lulusan pondok yang ilmunya menggenang, mengambang. Okelah kalau dia pulang membuat pondok lagi, akan tetapi kalau dia berada di lahan lain, maka dia tidak cukup metodologi untuk pengembangan. Dan problem ini harus diselesaikan melalui LP. Ma'arif. Di samping itu, anak-anak NU kalangan para akademisi yang tidak tersentuh agama mulai SD sampai sarjana memerlukan model pesantren mahasiswa. Jadi model pesantren *cross* antara ma'had ali dengan perguruan tinggi akan menumbuhkan regenerasi wawasan keagamaan dan wawasan keilmuan yang tidak putus. Ini dalam segi *dirasah* dan *tarbiyah*.

Dalam soal *tazkiyah* diwakili oleh thariqat-thariqat kita. Thariqat sekarang ini musti dikembalikan kepada asalnya menurut Ahlussunnah waljama'ah. Sebab kooptasi politik terhadap thariqat itu lebih besar dari thariqatnya sendiri. Sedangkan pengurus thariqatnya senang-senang saja dikooptasi. Para kiai menjadi bermacam-macam, ada yang tidak mau menerima bantuan karena takut subhat. Tapi juga ada yang marah-marah karena tidak dapat bagian. Ini penting, bagaimana mengembalikannya ke fitrah, sebab itu bagian dari aset. Di sini harus ada kodifikasi. Akan tetapi mana yang dilakukan kodifikasi *muha-fadhah 'ala al-qadiim al-shalih'*, mana yang pengembangan, *al-aqdu bi al-jadid al-aslah*, harus ada pemilahan.

Dari segi bahtsul masail, Munas Lampung sudah memberikan bekal, tapi tidak jalan. Karena cara menggunakan taqlid manhaji itu tidak segampang yang diperkirakan orang. Jarang di antara kita yang bisa berfikir manhaji, dan lembaga yang bisa memproduk kader NU yang mampu berfikir manhaji belum nampak. Instrumennya musti disiapkan. Sehingga setiap bahtsul masail itu tdak lagi menjadi masail tersendiri. Selama ini bahtsul masailnya itu sendiri adalah masalah. Kenapa? Karena persiapan dan metodologinya belum diperbaiki. Seharusnya orang datang membahas suatu masalah itu sudah kirimi referensi apa saja yang harus dibaca berkenaan dengan itu, sehingga ketika masuk tinggal *finished*. Bahtsul masail mengenai masalah-masalah yang *maudhu'ah* tuntutannya lebih banyak lagi karena diperlukan diskusi-diskusi, dan itu pun belum jelas apakah dihadiri tenaga ahli ataukah dihadiri oleh orang-orang yang *kepingin* kepada masalah. Dan ini mengenai masalah pengertian, pengamalan dan wawasan keagamaan.

Soal nilai-nilai NU yang lain misalnya soal faham kebangsaan yang khas NU, menurut Anda bagaimana?

Dalam hal ini pokok persoalannya adalah hubungan agama dengan negara. Ini perlu pembakuan, karena bedanya NU dengan gerakan-gerakan keagamaan yang formalis-ekslusif justru pada kaitan hubungan agama dan negara. Alhamdulilah, di Jawa Timur, sudah ada kajian intensif yang dipimpin oleh para kiai dengan beberapa tokoh-tokoh, seperti Wahid Zaini, Mukhit Muzadi, Yusuf Muhammad, Imron Hamzah dll. Mohon tulisan-tulisan hasil pemikiran jernih termasuk Pak Tholhah Hasan bisa dikembangkan dalam diskusi-diskusi secara lebih luas. Ini penting karena konsep *nation state* itu harus jelas dari NU, di samping cara beragama NU yang substansialis-inklusif, bukan formalis-eklusif. Ciri khusus keberagamaan NU adalah substansialisme yang inklusif. Bagaimana kita memandang Islam sebagai sebuah nilai sebuah perilaku tidak hanya agitasi nama Islam karena akan menimbulkan konflik dari berbagai macam sektor. Tetapi dengan membakukan substansialisme-inklusif dalam pluralisme bangsa perjalanan agama ini akan selamat dan merembes terus ke seluruh bangsa. Kalau tidak, belum sampai ke tujuan kita sudah bentrok. Pembakuan ini sangat penting, di samping untuk mejaga integritas NU, juga untuk mewariskan khazanah NU untuk generasi sekarang dan yang akan datang mengenai cara beragama NU dalam kaitannya dengan negara yang pluralis dan *nation state* ini seharusnya bagaimana. Ini perlu dibukukan sehingga bisa segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Mengenai persoalan krusial khittah dengan politik, banyak orang yang menuntut untuk diclearkan. Bagaimana menurut Anda?

Waktu khittah itu dilahirkan tahun '84, saya hanya menjadi panitia pelaksana saja, tidak terlibat langsung dalam pembicaraan itu. Tetapi saya mengikuti dengan pendengaran. Bahwa khittah itu ada yang bersifat nilai (*value*) yang konstan, selamanya tidak akan berubah, seperti *tawasuth, tawazun*, dan sebagainya. Tetapi juga ada nilai strategis. Nilai strategis ini lahir berdasarkan pendekatan historis, berdasarkan kebutuhan, bukan *value*, bukan nilai. Misalnya, bahwa NU tidak terikat dengan organisasi politik. Tidak terikat itu artinya tidak dikomando, bukan berarti *i'tizal* dari semuanya. Kemudian kalau kita tinjau lagi secara historis, sebenarnya kalau kita jujur mengaku pemahaman kita tentang khittah bukan secara nilai, sebagaimana tadi saya bedakan, yang nilai itu konstan selamanya, kalau masalah strategis dia bisa berubah. Misalnya, hubungan struktural, hubungan koalisi, hubungan baik dan sebagainya. Ke kiri dan ke kanan itu masalah strategis. Dan masalah strategis selalu ditentukan oleh kebutuhan pada saat itu. Memang pada saat itu tahun '84 tidak ada gunanya NU melakukan suatu konstituensi politik, karena politik yang ada itu tidak substansial politik, tetapi hanya format-format politik yang sebenarnya dikendalikan oleh pemerintah. Jadi sebaiknya langsung saja pada *juragan*nya dari pada kepada karyawan-karyawannya. Dan pada waktu itu tidak ada politisi di Indonesia, yang ada karyawan politik. Nah dalam konteks seperti itu mempertahankan nilai

untuk politik sangat riskan. Dan betul yang diresahkan oleh teman-teman seperti perumus khittah karena nilai yang luhur itu menjadi jatuh karena permainan politik yang main-main. Artinya bukan politik yang benar yang memang disiapkan untuk mengatur negara. Politik ketika itu adalah politik dari pada banyak pengangguran. Jadi menjadi profesionalisme politik, bukan idealisme politik, dan lebih baik di politik dari pada nganggur. Akan tetapi ketika berada pada era multi partai, —saya bukan fanatik PKB tapi sampai hari ini saya berpendapat bahwa— NU harus mempunyai kendaraan politik yang *under control* NU. Terserah mana saja, kalau Golkar bisa dikontrol silahkan, PPP mari, begitu pula PKB. Intinya harus ada, sebab kalau tidak ada akan timbul masalah-masalah sebagai berikut:

Pertama, kader-kader kita yang memang berbakat menjadi politisi tidak mendapatkan saluran yang jelas pada jenjang politik. Kenapa suara kita kita kasihkan orang lain sementara ketika orang lain besar lalu menghantam kita.

Kedua, sekalipun NU tidak berpolitik dan menghindarkan diri dari politik praktis, karena jumlah masa yang luas, tetap saja menjadi komoditas politik oleh orang lain, dan akan terjadi penyerbuan orang lain terhadap masa NU itu. Dan ketika itu terjadi dan kita lepas tangan dan mereka kita biarkan masuk di umat kita dengan dalilnya masing-masing, yang terjadi adalah benturan-benturan. Dan itu telah kita saksikan di lapangan. Terlepas teorinya bagaimana tapi itu yang terjadi di lapangan. Maka dapat dihitung, di satu daerah yang PKBnya mutlak, orang NU aman, yang PKBnya tidak ada sama sekali, aman juga karena tidak ada apa-apa. Tapi yang separuh, mesti bentrok. Dalam kekuatan yang sama, maka dapat dianalisa akan terjadi konflik. Kenapa Jatim agak aman, karena eksodus itu bersama-sama. Yang eksodusnya separo-separo rame, misalnya Pasuruan itu mirip dengan Jepara. Jika pindahnya ini bareng-bareng, dengan kiai-kiainya, DPRnya, hanya stempelnya saja yang ganti, selesai tidak apa-apa. Begitu pula Jabar aman, karena tidak ada apa-apa, tenang dan meyakinkan. Sementara Jakarta juga sama. Di Sumbar saya tanya ketua PKB, dia bilang di sini tidak ada NU yang ada hanya alumni PMII, juga tenang.

Masalahnya sekarang apakah jumlah umat kita akan kita biarkan diambil orang, sementara kemudian menghantam kita, atau kita pakai kendaraan yang BPKBnya milik NU, meskipun STNKnya boleh dibawa sopir. Kalau macam-macam BPKBnya ditarik, maka nggak laku. Sehingga kultur NU harus dilindungi oleh struktur pemerintah. Tetapi karena tidak mungkin semuanya berada satu partai maka harus ada alternatif, dan itu dengan penugasan sehingga tidak terjadi benturan. Dalam teori politik ada istilah sekoci-sekoci kecil dari perahu yang besar. Dia berada di mana-mana, dan kader yang tumbuh di mana-mana itu bukan membawa modal lalu dibawa lari menjauh. Oleh karenanya, saya berfikir, seandainya saya ditugasi NU untuk menghubungi tokoh-tokoh NU di luar PKB, saya siap, karena mereka itu bisa jadi DPR karena juga coblosan dari orang NU. Inipun kalau di luar PKB harus dibagi dengan orang lain, misalnya MI, sementara massa MInya sendiri nyoblos PAN. Kapan

kita selesai *dibodohin* seperti ini, kan lebih baik kembali saja sekalian dengan gerbongnya, pemilihnya jadi satu, mereka tidak akan kehilangan DPRnya. Itu penting, sebab kalau mereka kehilangan, mereka tidak mau diajak kembali. Faktornya adalah kepentingan. Politik adalah wilayah bebas keikhlasan. Jadi kalau mau memindahkan ya harus begitu. Ini yang saya maksud penyelesaian substansial, bukan penyelesaian pada kulit-kulit di seminar, lalu tidak selesai.

Dengan demikian mereka yang ada di PPP itu akan bersama-sama menjadi satu, kemudian memimpin itu secara bersama-sama, dalam tanda petik harus kembali kepada cara NU yang khittah, dalam arti nilai tadi, dan disepakati. Dia tidak boleh terjerumus pada fundamentalisme-ekslusif yang juga sudah meracuni beberapa tokoh NU, kenapa? Karena dia sudah lepas dari NU sekian tahun.

Apakah perlu Muktamar nanti menegaskan agar perjuangan kultural, pemberdayaan masyarakat tetap mejadi prioritas dengan cara pengaturan hubungan yang ketat antara NU dengan PKB?

NU tidak sama dengan PKB dan PKB tidak sama dengan NU. Ini sebuah keharusan. Sebab kalau NU jadi parpol, maka nilai itu akan tercerabut, kemudian dia mengkerucut menjadi politik praktis, seperti NU tahun 1971 yang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menyusun daftar caleg. Sehingga sektor *social welfare* terbengkalai, *mabadi' khoiro ummah* terbengkalai disebabkan pengkerucutan itu. Struktur secara formal harus terpisah, tetapi visi dan misinya harus dikendalikan. Bagaimana mengatur hal tersebut — sekalipun sulit sebab kita memang tidak biasa teratur— merupakan kebutuhan, harus tetap dijalankan. Sebagai contoh di Jawa Timur, Choirul Anam yang sudah jadi ketua PKB, lepas sebagai wakil ketua NU dan digantikan, supaya penampilan NU tetap multi sektoral *rahmatan li al-'alamin*, di sini *takhassus* politik. Tetapi bagaimana merakit kebijaksanaan di PKB, unsur NU secara *invisible, bilhikmah* harus tetap dilibatkan dalam merumuskan. Dengan demikian kita akan berjuang pada dua jenjang, jenjang NU yang *rahmatan li al-'alamin* dan peluru organisasi politik yang mencari tempat pada struktur kenegaraan, lalu memper-kokoh kultur. Tanpa begitu jangan harap, bahkan potensi kita akan menjadi masalah. Oleh karenanya menurut saya kalau kita mau memperbaiki politik, yang harus kita perbaiki adalah NU dan kinerja NU itu. Kalau ini sudah sehat, maka NU dapat diperhitungkan. Baru coblosannya saja sudah jadi partai begini besar, belum "marahnya". Jadi anggap saja partai itu bagian dari coblosannya NU. Sama sekali salah kalau NU menjadi sebuah subordinat dari PKB, begitu pula PPP. Partai harus menjadi subordinat dari NU. Secara struktural —karena dia memiliki *takhassus* tersendiri di bidang politik— maka diberi wewenang di dalam mengatur politik, strategi dan taktis, akan tetapi prinsip operasional, misi dan visinya harus dikendalikan oleh khittah tersebut. Jadi betul bahwa adalah salah mendikotomikan antara khittah dengan politik.

Saya mendapatkan pesan ini dari kiai-kiai sepuh yang mengingatkan agar hubungan NU dengan PKB diatur. Kata

kiai dengan bahasa yang mudah sekali, begini; '*NU karo PKB gulutane dewe-dewe tapi hasile mlebu pawon bareng-bareng*'. Ibarat deretan tanaman, antara ketela puhung sama jagung, itu sendiri-sendiri, tetapi kalau sudah panen masuk lumbung yang sama. Gerakan-gerakan kultural NU yang multi-dimensional, dia akan meng-garap multi sektoral dan lintas golongan dan politik. Sementara ada payung politik yang khusus bergerak di bidang itu. Kalau dua jenjang bergerak bersama-sama, maka akan jadi sangat baik dan efektif. Kalau tidak maka ada dua hal seperti di atas, yaitu anak-anak kita tidak ada penyaluran. Dan ikut berpolitik atau tidak kita tetap menjadi obyek politik. Tinggal pilih jadi subyek atau obyek. Dan kita akan diserbu dengan bermacam-macam cara dan dibelah umat kita, kalau mereka sudah besar mereka menganggap bahwa itu hasil mereka sendiri, dan tidak perlu berkontribusi untuk NU.

Jika Anda mendengar sebuah gagasan Anda lebih senang berfikir bagaimana gagasan itu dilaksanakan. Nah mengenai pelaksanaan ide penjam'iyyahan NU menurut Anda bagaimana?

Tentang bagaimana ide itu dilaksanakan harus distrukturkan dahulu. Saya mengusulkan: Pertama, harus ada perampingan struktural di NU karena banyaknya pekerjaan yang tumpang tindih yang disebabkan perangkat-perangkat NU terlalu banyak. Menurut saya, di bawah pengurus harian itu langsung lembaga, lalu seluruh lajnah berada di bawah lembaga itu sesuai dengan penjurusannya. Misalnya, sekarang ada Lakpesdam dan lain-lain, ini sebaiknya berada di bawah lembaga yang pas yaitu Ma'arif yang membidangi ilmu pengetahuan, dan dialah yang mengontrol lajnah-lajnah itu. Jadi jenjangnya tidak tiga, tapi lajnah itu berada di bawah lembaga. Sehingga langsung terkontrol pengurus harian. Lembaga bergerak pada tehnis operasional, sementara pengurus harian bergerak di bidang strategis dan masalah-masalah prinsip. Kemudian di lembaga itu diisi oleh orang yang ahli dalam bidangnya, koordinatornya bisa oleh salah satu ketua. Misal ketua Ma'arif, jangan diambilkan dari lulusan ta'mir, kacau. Bisa-bisa doktor nggak laku, akan tetapi di bidang kultural tidak memerlukan orang yang harus strata tinggi, tapi orang yang rajin. Di sini perlu ada simplifikasi struktural.

Kedua, hubungan antara NU dengan lembaga-lembaga ini harus hubungan *commanding*, sehingga seluruh surat-surat keluar harus diketahui oleh NU. Surat-surat keluar dari lembaga apalagi lajnah baik kepada instansi atau NGO yang ada harus diketahui oleh sekretaris atau sekjen, sehingga diketahui identitasnya dan tidak terjadi tumpang tindih. Sementara badan otonomi memiliki otonomi terbatas, di mana keterbatasan otonomi itu harus sudah ditentukan, paling tidak dalam Musyawarah Besar. Dengan demikian terjadilah penyelesaian secara struktural pada masalah-masalah tersebut.

Ketiga, tentang ketimpangan-ketimpangan daerah. Daerah-daerah yang sudah maju selama ini dikunjungi dan diperhatikan terus oleh PBNU, sementara yang lain tidak. Padahal dengan adanya sistem otonomi daerah yang sekarang diperkenalkan, Luar Jawa menjadi prioritas. Kalau NU tidak menggarap itu, maka pada

tingkat nasional NU akan mengalami kekalahan. Maka prioritasnya adalah daerah-daerah yang memang harus ditolong. Alhamdulillah, saya sudah pernah di Kalsel, Kalteng, Lampung. Di sana ada daerah-daerah yang mayoritas NU, namun karena tidak terawat, maka diambil alih orang lain yang mempunyai visi berbeda dengan NU. Hal ini bisa kita baca di Jabar, Sulsel, Kalsel atau di Lampung sebelah selatan. Kalau yang lain memang kecil, tetapi ini yang besar dan diambil orang baik secara struktural maupun visioner. Dan ini perlu ada prioritas ke situ. Akan tetapi sebagaimana kata Pak Matori, kalau tidak ada duit akan susah, untuk itu perlu ada solusi. Maka pemberdayaan ekonomi juga perlu dipikirkan, karena sesungguhnya di negara berkembang, nilai politik itu masih dibawah nilai ekonomi.

Keempat, tentang Syuriah dan Tanfidziah, menurut saya tidak ada problem, karena kesan bahwa Tanfidziah lebih berkuasa itu tergantung pada dua hal, yakni pada opini dan pada kualitas Syuriahnya. Kenapa Tanfidziah lebih dominan, sebab ia lebih bergerak pada tatanan operasionalnya. Sedangkan kiai-kiai itu bergerak pada waktu rapat saja. Selain itu seberapa kekuasaan ulama terhadap Tanfidziah itu tergantung juga pada model ulamanya dan model Tanfidziahnya. Pada ulama-ulama yang berjiwa organisatoris, maka bisa terkendali. Seperti saya ketika melakukan tugas selalu memberitahukan kepada Pak Imron, sekalipun sebatas laporan, sebab bila tidak saya ditegur. Dan itu tidak tergantung bahwa dua jenjang ini harus diubah. Dan saya tidak setuju bila Tanfidziah pada segala jenjang itu diangkat oleh Syuriah, sebab akan muncul nepotisme baru gaya NU. Seharusnya dipilih karena rentang kendali yang semakin kompleks membutuhkan orang-prang yang berkualitas, kapabel dan aceptebel. Dan ini musti orang yang mengerti lapangan. Oleh karenanya saya masih tetap cenderung ketua Tanfidziah itu harus dipilih, tetapi harus melalui rekomendasi Syuriah. Rekomendasi ini yang diperketat. Kalau dia salah dia bisa ditarik oleh Syuriah, sehingga kendalinya di situ. Bila seseorang ingin mencalonkan diri, harus mendapat dukungannya Rais 'Am terpilih. Dan tanda tangan itu mempunyai konsekwensi satu periode. Kalau ternyata ketua Tanfidziah menyeleweng dari garisnya, maka rekomendasi itu bisa ditarik. Jadi rekomendasi itu tidak hanya berlaku pada saat konfrensi, akan tetapi berlaku satu periode. Dan dia harus dipilih.